KAMPUS AKADEMIK PUBLISING
Jurnal Akademik Pengabdian Masyarakat (JAPM)
Vol.4, No.6 November 2026
e-ISSN: 3030-8631, p-ISSN : 3030-864X, Hal 255-270
DOI : https://doi.org/10.61722/japm.v4i6.13297

Reaktualisasi Kearifan Lokal Bugis-Makassar melalui Focus Group Discussion untuk Membangun Budaya Demokrasi Damai di Kota Makassar

Irfan B.[1*], Andi Rahmat Nizar Hidayat[2], Misbahuddin[3], Muh. Syilfa Nooviar[4], Muhammad Hidayat. L[5]
[1,2,3,4,5]Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Makassar, Jalan A.P. Pettarani, Makassar, Sulawesi Selatan, Indonesia, 90222
*Penulis Korespondensi: andirahmatnizarhidayat@unm.ac.id

Abstract. *This community engagement program aimed to strengthen understanding of peaceful ways of voicing aspirations and to re-actualize Bugis-Makassar local wisdom as social capital for conflict prevention, following the riots in Makassar City in late August 2025. Together with SERUM Institute, the team held a Focus Group Discussion on 1 December 2025 with twenty-five core participants drawn from university students, academics, security officers, religious leaders, literacy activists, and youth organization leaders. The activity followed four stages: preparation, orientation, participatory discussion guided by seven prompting questions, and reflection with the formulation of recommendations. Facilitator notes, participant observation, and documentation were analyzed thematically, and achievements were mapped at the output and outcome levels using indicators derived from each objective. The outputs were a multi-stakeholder dialogue forum, eight thematic findings, and four recommendations. At the outcome level, participants distinguished legitimate aspirations from destructive acts, identified the non-material losses caused by violence, and interpreted Sipakatau as mutual humanization, Sipakalebbi as mutual respect, and Sipakamase-mase as compassion and empathy. Participants considered tudang sipulung worth re-actualizing as a multi-stakeholder dialogue forum, while flagging the risk that a rigid application of cultural values may turn into a tool for imposing uniformity. Local wisdom can bridge democratic freedom and social responsibility when it is operationalized through education, regular dialogue forums, and the involvement of community leaders.*

Keywords: *Bugis-Makassar local wisdom; focus group discussion; peaceful democratic culture; Sipakatau; tudang sipulung*

Abstrak. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan memperkuat pemahaman mengenai penyampaian aspirasi secara damai dan mereaktualisasikan nilai kearifan lokal Bugis-Makassar sebagai modal sosial pencegahan konflik, menyusul kerusuhan akhir Agustus 2025 di Kota Makassar. Tim pengabdian bersama SERUM Institute menyelenggarakan *Focus Group Discussion* pada 1 Desember 2025 dengan dua puluh lima peserta inti lintas unsur, yaitu mahasiswa, akademisi, aparat keamanan, tokoh agama, pegiat literasi, dan pengurus organisasi kepemudaan. Kegiatan ditempuh melalui empat tahap: persiapan, orientasi, diskusi partisipatif berpanduan tujuh pertanyaan pemantik, serta refleksi dan perumusan rekomendasi. Catatan fasilitator, observasi partisipatif, dan dokumentasi dianalisis secara tematik, lalu capaiannya dipetakan pada tingkat keluaran dan hasil berdasarkan indikator yang diturunkan dari setiap tujuan. Keluaran kegiatan berupa forum dialog multipihak, delapan tema temuan, dan empat butir rekomendasi. Pada tingkat hasil, peserta membedakan aspirasi yang sah dari tindakan destruktif, mengidentifikasi kerugian nonmaterial kekerasan, serta memaknai *Sipakatau* sebagai prinsip saling memanusiakan, *Sipakalebbi* sebagai saling memuliakan, dan *Sipakamase-mase* sebagai kasih sayang dan empati. Peserta menilai *tudang sipulung* layak direaktualisasikan menjadi forum dialog multipihak, sekaligus menandai risiko penerapan nilai budaya secara kaku yang dapat berubah menjadi alat pemaksaan keseragaman. Kearifan lokal berpotensi menjembatani kebebasan demokratis dan tanggung jawab sosial apabila dioperasionalkan melalui pendidikan, forum dialog berkala, dan pelibatan tokoh masyarakat.

Kata kunci: budaya demokrasi damai; *focus group discussion*; kearifan lokal Bugis-Makassar; *Sipakatau*; *tudang sipulung*

Naskah Masuk: 04 November 2026; Revisi: 05 November 2026; Diterima: 06 November 2026 ; Terbit: 07 November 2026

1. LATAR BELAKANG

Demonstrasi merupakan salah satu bentuk artikulasi kepentingan warga yang paling terlihat dalam kehidupan demokrasi di Indonesia. Saluran ini bekerja ketika kanal formal dianggap tersumbat atau lamban merespons tuntutan publik. Persoalan muncul pada saat ekspresi politik tersebut bergeser menjadi pembakaran, penjarahan, perusakan, dan tindakan yang mengancam keselamatan orang. Pergeseran itu menciptakan jarak antara tujuan yang diperjuangkan dan cara yang ditempuh. Bukti eksperimental memperlihatkan bahwa tindakan protes yang ekstrem, termasuk kekerasan, justru menurunkan dukungan publik terhadap gerakan yang membawa tuntutan tersebut (Feinberg, Willer, & Kovacheff, 2020). Tinjauan yang lebih baru menambahkan bahwa efektivitas protes bergantung pada jenis aksi, audiens yang disasar, dan hasil yang diukur, serta bahwa aksi nirkekerasan efektif menggerakkan kelompok simpatisan (Shuman, Goldenberg, Saguy, Halperin, & van Zomeren, 2024). Demonstrasi kehilangan daya demokratisnya justru ketika kekerasan menjadi bahasa utamanya.

Persoalan tersebut menemukan bentuk paling nyata di Kota Makassar pada akhir Agustus 2025. Gelombang demonstrasi berujung pada pembakaran gedung DPRD Kota Makassar dan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. BPBD Kota Makassar mencatat empat korban jiwa dalam rangkaian insiden itu, tiga di antaranya meninggal dalam kebakaran gedung DPRD Kota Makassar (Fatir, 2025). Pemerintah Kota Makassar kemudian menggelar doa bersama untuk para korban tragedi 29 Agustus 2025 (Wardyah, 2025). Peristiwa itu menyisakan pertanyaan yang lebih luas daripada soal keamanan, yaitu bagaimana masyarakat, terutama komunitas kampus, merawat kebebasan menyampaikan pendapat tanpa kehilangan tanggung jawab terhadap keselamatan sesama.

Respons terhadap peristiwa semacam itu tidak cukup bertumpu pada pendekatan keamanan. Masyarakat Bugis-Makassar di Sulawesi Selatan menyimpan perbendaharaan nilai etika sosial, seperti *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakamase-mase*, serta tradisi musyawarah *tudang sipulung* yang mempertemukan pihak-pihak yang berbeda kepentingan dalam satu ruang (Nuh, 2016). Nilai dan tradisi tersebut merupakan modal sosial yang dapat diaktifkan kembali untuk mencegah perbedaan pendapat berkembang menjadi kekerasan. Pengaktifannya memerlukan ruang dialog yang mempertemukan mahasiswa, aparat, akademisi, dan tokoh masyarakat secara setara. *Focus Group Discussion* (FGD) dipilih sebagai bentuk ruang tersebut karena kedalaman diskusinya tumbuh dari interaksi antarpeserta yang memunculkan pandangan bersama sekaligus perbedaan (Ning, Liu, Miao, & Li, 2024).

Kajian tentang *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge* selama ini banyak berfokus pada pendidikan karakter, moderasi beragama, dan pembelajaran (Hamzah, Zubair, & Satriadi, 2023; Nur, Wildan, & Komariah, 2023; Rahmawati & Eli, 2023; Zubair, Hamzah, & Satriadi, 2022), sedangkan kajian *tudang sipulung* lebih banyak menyoroti sengketa hukum dan agraria (Nuh, 2016; Salle, Zainuddin, & Wahida, 2026). Laporan pengabdian yang mengoperasionalkan nilai-nilai tersebut dalam forum dialog lintas unsur tentang kekerasan dalam aksi massa, terlebih sesudah kerusuhan Agustus 2025, masih jarang ditemukan. Di situlah kebaruan kegiatan ini: kearifan lokal tidak hanya dibahas sebagai nilai, tetapi dipakai sebagai kerangka dialog antara mahasiswa, aparat, dan tokoh masyarakat, lalu dipetakan capaiannya pada tingkat keluaran dan hasil.

Tim pengabdian penulis bersama SERUM Institute (*Society Research and Humanity Development*) merancang dan melaksanakan forum tersebut pada Senin, 1 Desember 2025, di Silver Meeting Room Grand Asia Hotel, Kota Makassar. Forum diselenggarakan dengan judul resmi "Refleksi Akhir Tahun: Menyikapi Tindakan

Anarkisme Akibat Berkembangnya Paham Sosialis di Lingkup Perguruan Tinggi di Kota Makassar", sebagaimana tercantum pada materi publikasi kegiatan. Judul tersebut mengandung asumsi kausal bahwa tindakan anarkis dipicu oleh penyebaran paham politik tertentu. Artikel ini tidak menjadikan asumsi itu sebagai premis analisis karena asumsi tersebut tidak diuji dalam kegiatan dan berisiko menstigma gagasan politik mahasiswa; tujuh pertanyaan pemantik diskusi pun tidak menyentuh isu ideologi. Fokus kegiatan, dan fokus artikel ini, adalah mempertegas batas antara hak menyampaikan aspirasi dan tindakan yang merugikan orang banyak, dengan nilai kearifan lokal sebagai kerangka dialognya.

Tujuan kegiatan dirumuskan ke dalam empat butir. Pertama, meningkatkan pemahaman peserta mengenai demokrasi dan penyampaian aspirasi secara damai. Kedua, mengidentifikasi relevansi nilai kearifan lokal Bugis-Makassar dalam mencegah konflik sosial. Ketiga, membangun kesadaran mengenai penghormatan terhadap martabat manusia dalam aksi massa. Keempat, merumuskan strategi penguatan dialog dan musyawarah sebagai alternatif penyelesaian perbedaan.

2. KAJIAN TEORITIS

A. Demokrasi Deliberatif dan Kualitas Partisipasi

Demokrasi menempatkan warga negara sebagai pihak yang berhak ikut menentukan arah kehidupan publik. Cakupannya jauh melampaui pemungutan suara lima tahunan. Pengawasan terhadap kebijakan, penyampaian keberatan, dan perjuangan atas kepentingan bersama merupakan bagian yang sama pentingnya. Habermas (1996) menempatkan komunikasi dan pertukaran argumentasi di ruang publik sebagai proses inti pembentukan kehendak politik. Perbedaan pendapat, dalam kerangka itu, bukan gangguan terhadap demokrasi melainkan bahan bakunya, sejauh dikelola melalui percakapan yang terbuka dan menghormati lawan bicara.

Kualitas partisipasi menentukan apakah percakapan tersebut bermakna atau sekadar formalitas. Arnstein (1969) menyusun tangga partisipasi yang membentang dari manipulasi simbolik hingga kontrol nyata di tangan warga. Cornwall (2008) menambahkan dimensi yang kerap luput, yaitu bahwa makna partisipasi selalu bergantung pada relasi kuasa dan pada ruang yang benar-benar tersedia bagi suara warga. Riset deliberasi yang lebih baru memperkuat argumen tersebut. Eksperimen deliberasi berskala nasional *America in One Room* memperlihatkan bahwa forum deliberatif yang dirancang dengan baik mampu meredam polarisasi ekstrem dan mendorong pertimbangan warga yang lebih matang atas persoalan publik (Fishkin, Siu, Diamond, & Bradburn, 2021).

B. Modal Sosial dan Kearifan Lokal dalam Pencegahan Konflik

Perspektif modal sosial membantu menjelaskan mengapa sebagian masyarakat lebih tahan terhadap eskalasi kekerasan. Putnam (1995) merumuskan modal sosial sebagai jalinan jaringan, norma, dan kepercayaan yang memungkinkan orang berkoordinasi untuk kepentingan bersama. Masyarakat dengan modal sosial yang kuat memiliki rem sosial: perbedaan kepentingan tetap muncul, tetapi tersedia norma dan saluran yang mencegahnya berkembang menjadi kerusakan.

Norma semacam itu tidak selalu perlu diimpor dari luar. Diab, Pabbajah, Widyanti, Muthalib, dan Widyatmoko (2022) memperlihatkan bagaimana akomodasi kearifan lokal membantu menyelesaikan konflik masyarakat perkotaan yang beragam secara budaya, agama, dan etnis. Garing et al. (2023) menemukan bahwa bahasa nasihat, peribahasa, dan adat setempat di Maluku berperan membangun perdamaian dan dapat dirumuskan menjadi model penanganan konflik berbasis bahasa dan budaya daerah. Mekanisme

penyelesaian sengketa berbasis komunitas juga diakui sebagai jalur penyelesaian alternatif oleh berbagai komunitas di Indonesia (Sukriono, Sudirman, Rapita, Al Atok, & Bramantya, 2025).

Nilai budaya memperoleh bobot tambahan ketika masyarakat berhadapan dengan perubahan sosial yang cepat. Warisan antargenerasi menyediakan orientasi moral yang sudah dikenal dan diterima, sehingga tidak perlu diperkenalkan dari titik nol. Nismara, Jana, Aini, dan Puspitasari (2025) menilai resolusi konflik berbasis kearifan lokal lebih dekat dengan masyarakat karena bersumber dari pengalaman komunitas itu sendiri. Penguatan nilai lokal, dengan begitu, sama sekali bukan penolakan terhadap demokrasi, melainkan cara menautkan prinsip demokrasi pada akar sosial yang sudah ada.

C. Nilai Etika Sosial Bugis-Makassar

Masyarakat Bugis-Makassar menyimpan perbendaharaan nilai yang relevan dengan kebutuhan tersebut. Rahmawati dan Eli (2023) menemukan bahwa *Sipakatau* diwujudkan melalui hubungan saling menghormati, mendukung, dan memahami, sedangkan *Sipakalebbi* berkaitan dengan kerukunan serta penghargaan terhadap sesama. Zubair et al. (2022) menautkan triad *Sipakatau*, *Sipakainge*, dan *Sipakalebbi* dengan praktik moderasi beragama di tengah masyarakat Bugis, sementara Hamzah et al. (2023) menunjukkan bahwa ketiga nilai itu dipahami sebagai pedoman hidup yang menopang moderasi melalui sikap saling memanusiakan, saling menghormati, dan saling mengingatkan. Nur et al. (2023) mengusulkan integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam pembelajaran sebagai jalan pembentukan karakter yang kontekstual. Armin, Adliyah, dan Putra (2025) memperlihatkan bahwa filosofi *Sipakatau* dipakai untuk menyelesaikan sengketa pemilihan kepala desa di Kabupaten Luwu melalui forum musyawarah dan pertemuan sosial-keagamaan yang mempertemukan pihak-pihak yang bertikai. Nilai-nilai itu, dengan demikian, bekerja bukan hanya pada hubungan antarpribadi, melainkan juga pada konflik politik.

Sipakatau menempatkan manusia sebagai subjek yang wajib dimanusiakan. Terjemahannya dalam kehidupan demokratis cukup tegas: pihak yang berbeda pandangan tetap berhak diperlakukan sebagai manusia utuh. Perbedaan pilihan politik, kritik terhadap pemerintah, maupun penolakan atas suatu kebijakan tidak menghapus kewajiban tersebut. Prinsip inilah yang memungkinkan kritik disampaikan dengan tajam tanpa kehilangan sifat manusiawinya.

Sipakalebbi menambahkan lapisan penghormatan dan pemuliaan. Demokrasi menuntut kesediaan mendengar pandangan yang tidak disukai, dan kesediaan itu sulit tumbuh tanpa rasa hormat. Substansi kebijakan boleh dikritik sekeras mungkin; yang tidak boleh adalah merendahkan orang atau kelompok di baliknya. Norma ini berfungsi sebagai penahan terhadap kecenderungan dehumanisasi yang lazim muncul dalam konflik politik.

Sipakamase-mase meletakkan kasih sayang dan empati sebagai dasar hubungan sosial. Dalam kajian komunikasi antarbudaya, prinsip saling mengasihi ini juga dikenal sebagai *siammasei*, yang bersama *sipakatau* dan *siasseajingeng* (persaudaraan) menopang hubungan antaretnis di Sulawesi Selatan (Riswandi, 2024). Relevansinya menguat justru pada situasi yang berpotensi menimbulkan korban. Empati memaksa seseorang membayangkan akibat tindakannya bagi orang lain sebelum tindakan itu dilakukan, sehingga nilai ini berfungsi sebagai rem moral terhadap godaan menjadikan kekerasan sebagai jalan pintas penyampaian aspirasi.

Kegiatan ini sengaja menempatkan *Sipakamase-mase* sebagai nilai ketiga, alih-alih *Sipakainge* yang lazim melengkapi *Sipakatau* dan *Sipakalebbi*. Pilihan tersebut berangkat

dari persoalan yang digarap: kerugian terbesar dari kekerasan dalam aksi massa justru ditanggung warga yang tidak terlibat, sehingga empati terhadap mereka menjadi titik masuk yang paling langsung. Prinsip *Sipakainge* atau saling mengingatkan tidak ditinggalkan. Prinsip itu bekerja di dalam praktik musyawarah, tempat para pihak saling menegur dan mengoreksi secara beradab, dan dibahas kembali pada bagian hasil dan pembahasan.

D. Tudang Sipulung sebagai Tradisi Musyawarah

Selain ketiga nilai itu, masyarakat Bugis-Makassar mengenal *tudang sipulung* sebagai tradisi duduk bersama untuk menyelesaikan persoalan. Nuh (2016) menempatkannya sebagai mekanisme resolusi konflik yang mampu mempertemukan pemerintah, aparat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan pihak yang bersengketa dalam satu ruang. Salle et al. (2026) memperlihatkan bahwa mekanisme yang sama dapat menyelesaikan sengketa tanah secara damai sekaligus memulihkan ikatan sosial dan menekan risiko kekerasan. Dialog dan musyawarah, dengan demikian, bukan gagasan asing yang perlu diperkenalkan, melainkan praktik yang sudah berakar.

3. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan, Lokasi, dan Pelaksana Kegiatan

Kegiatan pengabdian ini menggunakan pendekatan partisipatif dengan metode FGD. Pilihan tersebut menyesuaikan diri dengan watak persoalan yang digarap. Kekerasan dalam aksi massa menyangkut pengalaman, tafsir, dan nilai, sehingga sulit dijelaskan melalui ceramah searah. Forum diskusi diposisikan sebagai ruang pembelajaran sosial atau *social learning space* tempat peserta membandingkan pengalaman dan menyusun pemahaman bersama, bukan semata teknik penggalian data. Kegiatan dirancang dan dilaksanakan bersama oleh tim pengabdian dan SERUM Institute, mulai dari penyusunan materi dan panduan diskusi hingga pencatatan dan perumusan rekomendasi. Forum berlangsung pada Senin, 1 Desember 2025, pukul 12.30 WITA sampai selesai, bertempat di Silver Meeting Room Grand Asia Hotel, Kota Makassar.

B. Peserta Kegiatan

Forum terbuka bagi audiens yang lebih luas, terutama mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Kota Makassar. Diskusi terfokus, pencatatan fasilitator, dan analisis dalam artikel ini dibatasi pada dua puluh lima peserta inti yang ditetapkan pada tahap persiapan. Komposisi peserta inti sengaja dibuat beragam agar percakapan tidak berhenti pada satu sudut pandang, misalnya hanya dari perspektif keamanan atau hanya dari perspektif gerakan mahasiswa. Lima di antaranya bertindak sebagai narasumber yang mewakili akademisi, kepolisian, tokoh agama, dunia literasi, dan lembaga pengabdian, sehingga peserta diskusi berjumlah dua puluh orang. Karakteristik peserta inti disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Karakteristik Peserta Inti Kegiatan (n = 25).

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
1	Unsur keterwakilan	Mahasiswa dan pengurus lembaga kemahasiswaan	11	44,0
		Akademisi dan pimpinan perguruan tinggi	6	24,0
		Organisasi kepemudaan dan pegiat literasi	5	20,0
		Aparat keamanan dan tokoh agama	3	12,0
2	Rentang usia	19–25 tahun	12	48,0

No	Karakteristik	Kategori	Jumlah	%
		26–40 tahun	7	28,0
		Di atas 40 tahun	6	24,0
3	Pengalaman terlibat aksi massa	Pernah terlibat langsung	14	56,0
		Belum pernah terlibat langsung	11	44,0
4	Peran dalam forum	Narasumber	5	20,0
		Peserta diskusi	20	80,0

Sumber: Data primer kegiatan, diolah (2025).

C. Tahapan Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ditempuh melalui empat tahap yang saling menyambung. Susunan tahapan dirancang agar peserta bergerak dari pengungkapan pengalaman menuju perumusan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti. Alur kegiatan digambarkan pada Gambar 1, sedangkan rincian setiap tahap disajikan pada Tabel 2.



Sumber: Diolah penulis (2026).

Gambar 1. Alur Empat Tahap Pelaksanaan Kegiatan.

Tabel 2. Rincian Tahapan Pelaksanaan Kegiatan.

No	Tahap	Kegiatan	Waktu	Luaran
1	Persiapan	Identifikasi persoalan, penyusunan materi dan panduan pertanyaan, serta penetapan peserta inti	–	Panduan diskusi
2	Orientasi	Penjelasan tujuan kegiatan dan pemaparan lima narasumber lintas unsur	60 menit	Kerangka bersama
3	Diskusi partisipatif	Pembahasan tujuh pertanyaan pemantik dengan fasilitator sebagai pemandu	75 menit	Catatan tema diskusi
4	Refleksi dan rekomendasi	Perumusan pelajaran bersama dan penyusunan rekomendasi tindak lanjut	45 menit	Empat butir rekomendasi

Sumber: Diolah penulis (2026).

Materi pengantar pada tahap orientasi mencakup tujuh pokok bahasan, yaitu demokrasi dan partisipasi masyarakat, demonstrasi sebagai penyampaian aspirasi, batas antara kebebasan dan tanggung jawab, konflik sosial dan kekerasan, kearifan lokal Bugis-Makassar, nilai *Sipakatau* bersama *Sipakalebbi* dan *Sipakamase-mase*, serta *tudang sipulung* sebagai tradisi musyawarah. Materi tersebut diposisikan sebagai bahan yang boleh diperdebatkan, bukan sebagai kesimpulan yang harus diterima.

D. Teknik Fasilitasi dan Keterlibatan Peserta

Tahap diskusi partisipatif dipandu oleh fasilitator dari tim pengabdian. Tujuh pertanyaan pemantik dibahas secara berurutan, mulai dari kedudukan demonstrasi dalam kehidupan demokrasi, titik ketika demonstrasi kehilangan substansi demokratisnya, dan dampak sosial kekerasan, lalu penerapan *Sipakatau*, peran *Sipakalebbi*, kontribusi

Sipakamase-mase, hingga kemungkinan aktualisasi *tudang sipulung* pada konflik masa kini. Pada setiap pertanyaan, fasilitator menjaga arah percakapan, menggali pandangan yang belum muncul melalui pertanyaan lanjutan, dan menandai titik kesepakatan maupun perbedaan sebelum berpindah ke pertanyaan berikutnya.

Komposisi forum yang mempertemukan mahasiswa dengan aparat, pimpinan perguruan tinggi, dan tokoh agama berisiko membuat suara peserta muda tenggelam. Ning et al. (2024) menunjukkan bahwa kedalaman dan arah diskusi dalam FGD dipengaruhi faktor situasional, termasuk karakteristik peserta dan pengaruh moderator, sehingga pengelolaan dinamika kelompok menjadi tanggung jawab fasilitator. Karena itu, pemaparan narasumber ditempatkan pada tahap orientasi, sedangkan tahap diskusi memberi ruang utama kepada dua puluh peserta diskusi. Materi narasumber diperlakukan sebagai bahan pemantik, bukan sebagai data temuan.

E. Teknik Pengumpulan dan Analisis Data

Data dikumpulkan melalui empat sumber, yaitu catatan fasilitator, observasi partisipatif, dokumentasi kegiatan, serta rumusan refleksi dan rekomendasi yang disepakati pada tahap akhir. Fasilitator mencatat pernyataan yang berulang, ketidaksepakatan yang menajam, serta pergeseran posisi peserta sepanjang diskusi. Analisis tematik dilakukan dengan mengikuti praktik analisis tematik refleksif (Braun & Clarke, 2021): catatan dibaca berulang untuk pengenalan data, pernyataan peserta diberi kode awal, kode dikelompokkan menjadi tema kandidat, tema ditinjau kembali terhadap catatan, lalu dinamai dan dirumuskan. Analisis dipusatkan pada pernyataan yang muncul pada tahap diskusi partisipatif dan refleksi. Proses tersebut menghasilkan delapan tema yang diuraikan pada bagian hasil dan pembahasan. Hasil pengelompokan kemudian ditafsirkan dengan menghubungkannya pada konsep demokrasi deliberatif, partisipasi masyarakat, modal sosial, dan resolusi konflik berbasis kearifan lokal.

F. Indikator Capaian dan Instrumen Evaluasi Lanjutan

Kegiatan ini tidak memasang pengukuran sebelum dan sesudah kegiatan. Capaian karena itu tidak dinyatakan sebagai skor peningkatan pengetahuan, melainkan dibaca melalui indikator kualitatif yang diturunkan dari setiap tujuan dan diverifikasi terhadap catatan fasilitator serta rumusan refleksi peserta. Indikator dan sumber buktinya disajikan pada Tabel 3. Pembedaan antara keluaran dan hasil mengikuti logika model program, yaitu keluaran sebagai produk langsung dari kegiatan dan hasil sebagai perubahan yang diharapkan pada diri sasaran (Gernert, Schuber, & Schaller, 2023).

Tabel 3. Indikator Capaian Kegiatan dan Sumber Bukti.

No	Tujuan	Indikator capaian	Sumber bukti
1	Pemahaman demokrasi dan penyampaian aspirasi secara damai	Peserta membedakan aspirasi yang sah dari tindakan destruktif dan menempatkan demonstrasi sebagai hak yang menuntut tanggung jawab sosial	Catatan fasilitator (tema 1)
2	Relevansi nilai kearifan lokal Bugis-Makassar	Peserta menerjemahkan *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakamase-mase* ke dalam perilaku penyampaian aspirasi serta menandai batas penerapannya	Catatan fasilitator (tema 3–5, 7, dan 8)
3	Kesadaran atas martabat manusia dalam aksi massa	Peserta mengidentifikasi kerugian kekerasan, termasuk kerugian nonmaterial	Catatan fasilitator (tema 2)
4	Strategi penguatan dialog dan musyawarah	Peserta menilai kelayakan *tudang sipulung* sebagai forum dialog dan menyepakati rekomendasi tindak lanjut	Rumusan refleksi dan rekomendasi (tema 6)

Sumber: Diolah penulis (2026).

Untuk mengukur perubahan pemahaman dan sikap pada forum lanjutan, tim pengabdian menyiapkan instrumen evaluasi dengan desain retrospektif sebelum–sesudah (*retrospective pretest–posttest*). Pada setiap butir, responden menilai kondisinya sesudah forum sekaligus kondisinya sebelum forum. Desain ini dipilih karena mampu menangkap perubahan yang luput dari pengukuran sebelum–sesudah konvensional ketika skor awal peserta sudah tinggi, terutama pada peserta yang mengikuti program atas kemauan sendiri (Kowalski, 2023). Sepuluh butir skala Likert 1–5 pada Tabel 4 dilengkapi pertanyaan terbuka mengenai perubahan cara pandang, penerapan nilai, dan masukan bagi forum berikutnya, sehingga skor dapat dibaca bersama penjelasan peserta. Instrumen ini akan diisi peserta pada akhir setiap forum lanjutan sebagai bagian dari mekanisme pemantauan program.

Tabel 4. Butir Instrumen Evaluasi Retrospektif untuk Forum Lanjutan.

Dimensi	No	Butir pernyataan
Pemahaman demokrasi	1	Saya memahami bahwa demonstrasi adalah hak demokratis yang disertai tanggung jawab sosial
	2	Saya dapat membedakan penyampaian aspirasi yang sah dari tindakan yang merusak dan membahayakan orang lain
Kesadaran dampak kekerasan	3	Saya memahami bahwa kekerasan dalam aksi massa menimbulkan kerugian nonmaterial, seperti trauma dan rusaknya kepercayaan antarkelompok
	4	Saya mempertimbangkan dampak tindakan saya terhadap warga yang tidak terlibat sebelum ikut dalam aksi massa
Relevansi nilai budaya	5	Saya dapat menjelaskan makna *Sipakatau* dalam konteks penyampaian aspirasi
	6	Saya dapat menjelaskan makna *Sipakalebbi* dalam konteks penyampaian aspirasi
	7	Saya dapat menjelaskan makna *Sipakamase-mase* dalam konteks penyampaian aspirasi
	8	Saya menyadari bahwa nilai budaya dapat disalahgunakan untuk membungkam perbedaan jika ditafsirkan secara kaku
Dialog dan musyawarah	9	Saya memandang *tudang sipulung* sebagai cara yang layak untuk menyelesaikan perbedaan pendapat dengan pemerintah atau aparat
	10	Saya bersedia terlibat dalam forum dialog multipihak sebagai alternatif dari aksi yang berisiko kekerasan

Sumber: Disusun tim pengabdian (2026).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil kegiatan disajikan dalam dua lapis. Lapis pertama memaparkan delapan tema yang muncul selama diskusi beserta pembahasannya. Lapis kedua merangkum capaian kegiatan dengan membedakan keluaran (*output*) dari hasil (*outcome*). Ringkasan kedelapan tema beserta fokus pertanyaan yang memunculkannya disajikan pada Tabel 5.

Tabel 5. Matriks Tema Hasil Analisis Diskusi.

No	Tema	Fokus pertanyaan pemantik	Ringkasan temuan
1	Demonstrasi sebagai instrumen demokrasi	Kedudukan demonstrasi; titik hilangnya substansi demokratis	Demonstrasi diakui sah, tetapi legitimasinya tergerus ketika kekerasan mengambil alih
2	Kekerasan sebagai persoalan sosial dan budaya	Dampak sosial kekerasan	Empat lapis kerugian: material, rasa aman, trauma sosial, kepercayaan antarkelompok

No	Tema	Fokus pertanyaan pemantik	Ringkasan temuan
3	*Sipakatau* sebagai landasan kemanusiaan	Penerapan *Sipakatau*	Menghormati martabat pihak berbeda, termasuk aparat dan warga yang tidak sepakat
4	*Sipakalebbi* sebagai etika penghormatan	Peran *Sipakalebbi*	Penghormatan dua arah antara pengkritik dan pihak yang dikritik
5	*Sipakamase-mase* dan empati sosial	Kontribusi *Sipakamase-mase*	Membayangkan pihak yang menanggung akibat sebelum bertindak
6	*Tudang sipulung* sebagai dialog multipihak	Aktualisasi *tudang sipulung*	Filosofi duduk bersama diambil, bukan bentuk adat yang literal
7	Kearifan lokal sebagai modal sosial	Lintas pertanyaan dan tahap refleksi	Nilai berguna bila dioperasionalkan melalui pendidikan, forum, dan mediasi
8	Batas penerapan nilai budaya	Tahap refleksi	Risiko tafsir kaku yang membungkam suara muda

Sumber: Hasil analisis tematik catatan fasilitator (2026).

A. Demonstrasi sebagai Instrumen Demokrasi

Percakapan pada bagian awal memperlihatkan sikap peserta yang jauh dari penolakan terhadap aksi massa. Demonstrasi diakui sebagai saluran kontrol sosial terhadap pemerintah dan lembaga publik, terutama ketika kanal formal dinilai lamban. Kegiatan karena itu tidak diarahkan untuk membangun citra buruk terhadap demonstrasi.

Diskusi kemudian menajam pada pembedaan antara ekspresi demokratis dan tindakan destruktif. Legitimasi sosial diperoleh ketika aksi digunakan untuk menyampaikan tuntutan secara terbuka; legitimasi itu tergerus ketika pembakaran, penjarahan, dan perusakan mengambil alih panggung. Temuan tersebut menguatkan perspektif Habermas (1996) bahwa ruang publik demokratis hidup dari pertukaran argumentasi, sekaligus sejalan dengan bukti bahwa tindakan protes yang ekstrem menggerus dukungan publik terhadap gerakan (Feinberg et al., 2020; Shuman et al., 2024). Ruang deliberasi menyempit begitu argumentasi digantikan kekerasan, sebab pihak yang berbeda tidak lagi berhadapan sebagai warga yang setara.

B. Kekerasan sebagai Persoalan Sosial dan Budaya

Peserta mengidentifikasi empat lapis kerugian yang ditimbulkan kekerasan, yaitu kerugian material, hilangnya rasa aman, munculnya trauma sosial, dan rusaknya kepercayaan antarkelompok. Dua lapis terakhir jarang masuk hitungan karena tidak terlihat pada laporan kerusakan. Seorang peserta menyebut pengalamannya menghindari kawasan tertentu berbulan-bulan setelah kerusuhan, meskipun bangunan di kawasan itu sudah diperbaiki.

Putnam (1995) menyediakan kerangka untuk membaca kerugian tersebut. Kekerasan merusak kepercayaan atau *trust* dan jaringan sosial atau *social networks* yang dibutuhkan masyarakat untuk bekerja sama. Pemulihan pascakonflik dengan demikian tidak selesai pada perbaikan fisik. Modal sosial yang rusak memerlukan waktu pemulihan yang jauh lebih panjang daripada anggaran rehabilitasi bangunan.

C. *Sipakatau* sebagai Landasan Kemanusiaan

Peserta memaknai *Sipakatau* sebagai prinsip yang menempatkan manusia sebagai manusia. Terjemahannya pada konteks aksi massa cukup konkret: perbedaan pandangan tidak menghapus kewajiban menghormati lawan bicara, termasuk aparat yang bertugas maupun warga yang tidak sepakat dengan tuntutan. Pemaknaan tersebut sejalan dengan Rahmawati dan Eli (2023) yang menemukan perwujudan *Sipakatau* melalui sikap saling

menghormati, mendukung, dan memahami, serta dengan Armin et al. (2025) yang memperlihatkan peran *Sipakatau* dalam meredakan konflik politik di tingkat desa.

D. *Sipakalebbi* sebagai Etika Penghormatan

Pembahasan *Sipakalebbi* berkembang menjadi salah satu bagian paling hidup dalam diskusi. Peserta menghubungkannya dengan kemampuan menerima perbedaan sebagai sesuatu yang wajar. Ruang dialog berubah menjadi arena konfrontasi begitu perbedaan dibaca sebagai ancaman. Nilai ini bekerja dua arah: masyarakat dituntut menjaga martabat pihak yang dikritik, sementara pemerintah dituntut menghargai warga yang menyampaikan kritik. Timbal balik itulah yang menurut peserta paling sering absen dalam praktik.

E. *Sipakamase-mase* dan Penguatan Empati Sosial

Sipakamase-mase dibaca peserta sebagai dasar membangun empati di ruang publik. Kekerasan kerap tumbuh ketika seseorang berhenti melihat pihak lain sebagai manusia yang memiliki keluarga dan kehidupan. Peserta menilai bahwa siapa pun yang terlibat aksi massa perlu membayangkan lebih dahulu siapa yang akan menanggung akibatnya. Pengalaman kota ini pada Agustus 2025, ketika korban jiwa mencakup orang-orang yang terjebak dalam gedung yang dibakar dan seorang warga yang dikeroyok karena disangka petugas intelijen (Fatir, 2025), memberi bobot nyata pada pandangan tersebut. Ringkasan reaktualisasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik demokrasi disajikan pada Tabel 6.

Tabel 6. Reaktualisasi Nilai Kearifan Lokal Bugis-Makassar dalam Praktik Demokrasi.

No	Nilai	Makna dasar	Wujud dalam penyampaian aspirasi
1	*Sipakatau*	Saling memanusiakan	Menghormati martabat pihak yang berbeda pandangan, termasuk aparat dan warga yang tidak sepakat
2	*Sipakalebbi*	Saling memuliakan	Mengkritik substansi kebijakan tanpa merendahkan orang atau kelompok di baliknya
3	*Sipakamase-mase*	Kasih sayang dan empati	Mempertimbangkan dampak tindakan terhadap warga yang tidak terlibat dalam konflik
4	*Tudang sipulung*	Duduk bersama untuk musyawarah	Forum dialog multipihak yang mempertemukan pemerintah, aparat, kampus, dan masyarakat

Sumber: Hasil analisis tematik catatan fasilitator (2026).

F. *Tudang Sipulung* sebagai Model Dialog Multipihak

Gagasan *tudang sipulung* muncul kembali sebagai salah satu hasil terpenting kegiatan. Nuh (2016) dan Salle et al. (2026) menempatkannya sebagai mekanisme penyelesaian masalah melalui duduk bersama yang melibatkan banyak pihak sekaligus. Peserta menilai prinsip itu dapat dikembangkan menjadi forum dialog antara pemerintah, aparat, kampus, organisasi kepemudaan, tokoh adat, tokoh agama, dan kelompok masyarakat sipil.

Pemahaman peserta terhadap tradisi tersebut bersifat substantif, bukan seremonial. *Tudang sipulung* tidak harus hadir dalam bentuk pertemuan adat yang literal. Yang diambil adalah filosofinya, yaitu duduk bersama, mendengarkan, berbicara secara bergantian, dan mencari jalan keluar secara kolektif. Suasana kegiatan dan materi publikasi forum terekam pada Gambar 2.



Sumber: Dokumentasi kegiatan (2025).

Gambar 2. Dokumentasi Pelaksanaan dan Materi Publikasi *Focus Group Discussion* di Kota Makassar.

Dalam pembacaan tim pengabdian, filosofi tersebut sekaligus mengoperasionalkan prinsip *Sipakainge*, yaitu saling mengingatkan secara terbuka dan beradab (Hamzah et al., 2023). Dalam forum semacam itu, kritik terhadap kebijakan dapat disampaikan sebagai teguran antarsesama warga, bukan sebagai serangan. Prinsip ini belum dibahas secara khusus dalam FGD dan layak menjadi fokus forum lanjutan.

G. Kearifan Lokal sebagai Modal Sosial Pencegahan Konflik

Diskusi memperlihatkan potensi kearifan lokal sebagai modal sosial pencegahan konflik. Penilaian tersebut sejalan dengan Diab et al. (2022) mengenai peran akomodasi kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik masyarakat yang heterogen, dan dengan Garing et al. (2023) yang merumuskan model penanganan konflik berbasis bahasa dan budaya daerah. Nismara et al. (2025) menambahkan alasan praktisnya, yaitu kedekatan pendekatan ini dengan pengalaman hidup komunitas.

Peserta menekankan bahwa nilai budaya baru berguna ketika dioperasionalkan. Jalurnya beragam, mulai dari kurikulum pendidikan, forum warga, kegiatan kepemudaan, dialog publik, hingga mekanisme mediasi konflik. Usulan memasukkan nilai ke dalam kurikulum ini sejalan dengan gagasan Nur et al. (2023) tentang integrasi nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakainge* ke dalam pembelajaran. Kearifan lokal yang berhenti sebagai simbol kebudayaan tidak akan berpengaruh pada perilaku siapa pun.

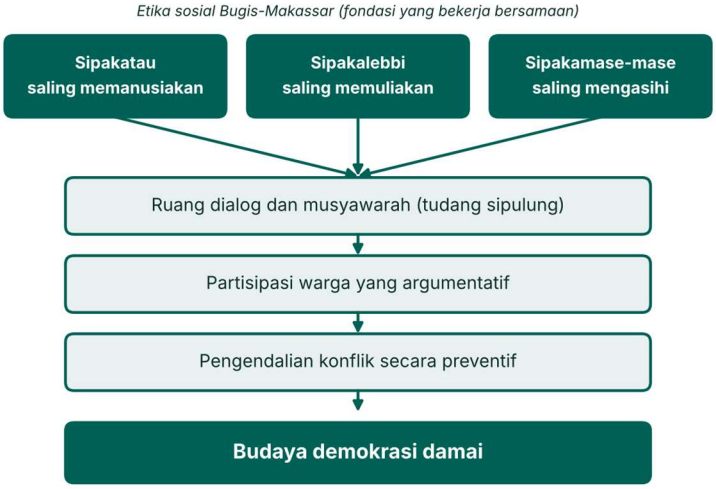
H. Batas Penerapan Nilai Budaya

Kesadaran kritis muncul pada bagian akhir diskusi. Peserta menolak penerapan nilai budaya secara romantis tanpa memperhatikan konteks sosialnya. *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakamase-mase* dimaksudkan untuk memperkuat penghormatan, bukan untuk memaksakan keseragaman. Nilai penghormatan terhadap yang lebih tua, misalnya, berisiko berubah menjadi pembungkaman terhadap suara muda apabila ditafsirkan secara kaku.

Kekhawatiran tersebut layak diperhatikan. Cornwall (2008) telah mengingatkan bahwa ruang partisipasi selalu dibentuk oleh relasi kuasa yang bekerja di dalamnya, termasuk relasi kuasa yang bersumber dari struktur budaya. Penguatan kearifan lokal karena itu perlu berjalan seiring dengan prinsip kesetaraan, hak asasi manusia, dan penghormatan terhadap keberagaman.

I. Model Konseptual Reaktualisasi Nilai

Rangkaian temuan tersebut dapat disusun menjadi satu model konseptual. Ketiga nilai etika sosial Bugis-Makassar bekerja bersamaan sebagai fondasi yang menopang terbukanya ruang dialog dan musyawarah. Ruang tersebut memungkinkan partisipasi warga berlangsung secara argumentatif, yang pada gilirannya membuka jalan bagi pengendalian konflik secara preventif. Muara dari rangkaian itu adalah budaya demokrasi damai, sebagaimana ditampilkan pada Gambar 3.



Sumber: Diolah penulis (2026).

Gambar 3. Model Reaktualisasi Kearifan Lokal Bugis-Makassar menuju Budaya Demokrasi Damai.

Kedudukan kearifan lokal dalam model tersebut adalah sebagai jembatan antara kebebasan demokratis dan tanggung jawab sosial. Kebebasan tanpa penopang etis mudah tergelincir menjadi kerusakan, sedangkan tanggung jawab tanpa kebebasan berubah menjadi pembungkaman. Nilai budaya menempati posisi di antara keduanya.

J. Capaian Kegiatan: Keluaran dan Hasil

Empat butir rekomendasi berhasil dirumuskan pada tahap penutup, meliputi penguatan pendidikan demokrasi berbasis budaya lokal, pengembangan forum dialog multipihak secara terencana, pelibatan tokoh masyarakat dan tokoh adat sebagai mediator sosial, serta integrasi ketiga nilai tersebut ke dalam program pemberdayaan masyarakat. Capaian kegiatan dipetakan dengan logika model program yang memisahkan keluaran langsung dari hasil pada diri peserta, dengan catatan bahwa dalam intervensi sosial hubungan antartahap jarang berlangsung linear dan model perlu disesuaikan ketika intervensi berkembang (Gernert et al., 2023). Keluaran adalah produk yang langsung dihasilkan kegiatan, sedangkan hasil adalah perubahan pemahaman, sikap, atau tindakan peserta. Indikator pada Tabel 3 menjadi dasar pemetaan tersebut, yang disajikan pada Tabel 7.

Tabel 7. Keluaran (*Output*) dan Hasil (*Outcome*) Kegiatan.

Tingkat	Capaian	Sumber bukti
Keluaran (*output*)	Satu forum FGD lintas unsur terlaksana selama tiga jam; 25 peserta inti dari empat unsur terlibat; tujuh pertanyaan pemantik dibahas; delapan tema dan empat butir rekomendasi tersusun	Daftar hadir, dokumentasi, catatan fasilitator
Hasil jangka pendek (selama kegiatan)	Peserta menempatkan demonstrasi sebagai hak yang menuntut tanggung jawab sosial, mengidentifikasi empat lapis kerugian kekerasan, menerjemahkan tiga nilai Bugis-Makassar ke dalam perilaku penyampaian aspirasi, menilai *tudang sipulung* layak menjadi forum dialog, dan menandai risiko tafsir budaya yang kaku	Catatan fasilitator dan rumusan refleksi
Hasil menengah (sesudah kegiatan)	Penerapan nilai dalam kegiatan organisasi dan keterlibatan peserta dalam dialog lanjutan (belum diukur; akan dinilai dengan instrumen pada Tabel 4 dalam forum lanjutan)	–
Dampak jangka panjang	Budaya demokrasi damai dan berkurangnya kekerasan dalam aksi massa (belum diukur; menjadi sasaran program keberlanjutan)	–

Sumber: Hasil kegiatan, diolah (2026).

K. Mekanisme Keberlanjutan

Pembangunan budaya demokrasi damai menuntut kesinambungan. Satu forum hanya membuka percakapan; perawatannya memerlukan agenda yang berulang. Rancangan mekanisme keberlanjutan yang diusulkan tim pengabdian disajikan pada Tabel 8. Rancangan tersebut menetapkan penanggung jawab, bentuk kegiatan, indikator, dan periode untuk setiap komponen agar kegiatan tidak berhenti sebagai acara seremonial tahunan.

Tabel 8. Rancangan Mekanisme Keberlanjutan Program.

Komponen	Penanggung jawab	Bentuk kegiatan	Indikator	Periode
Forum *tudang sipulung* kampus	Tim pengabdian dan SERUM Institute	Forum dialog lintas unsur dengan tema yang ditetapkan bersama peserta	Jumlah forum; keterwakilan unsur	Tiap semester
Kader fasilitator sebaya	Tim pengabdian bersama organisasi kemahasiswaan	Pelatihan fasilitasi dialog berbasis *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, *Sipakamase-mase*, dan *Sipakainge*	Jumlah kader terlatih; forum yang difasilitasi kader	Enam bulan pertama
Integrasi materi pembelajaran	Perguruan tinggi peserta	Sisipan materi pada mata kuliah kewarganegaraan dan pembekalan organisasi mahasiswa	Jumlah mata kuliah atau kegiatan yang memuat materi	Tahunan
Kanal dialog dengan pemerintah dan aparat	Pemerintah daerah dan kepolisian	Akses ruang pertemuan, data kebijakan, dan titik kontak dialog sebelum aksi	Forum dialog yang dihadiri pemerintah atau aparat	Sesuai kebutuhan
Pemantauan dan evaluasi	Tim pengabdian	Instrumen retrospektif (Tabel 4) dan refleksi terstruktur pada akhir setiap forum	Skor perubahan; laporan evaluasi	Setiap forum

Sumber: Diolah penulis (2026).

Pembagian peran dalam rancangan itu berangkat dari keunggulan masing-masing pihak. Perguruan tinggi menyediakan pendampingan akademik serta instrumen evaluasi, organisasi kepemudaan berperan sebagai penggerak dan penyedia jejaring peserta, sedangkan pemerintah daerah dapat membuka akses terhadap ruang pertemuan dan data kebijakan. Kader fasilitator sebaya menjadi kunci agar forum dapat berjalan tanpa selalu bergantung pada tim pengabdian.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kegiatan pengabdian ini memperlihatkan hubungan yang saling menguatkan antara demokrasi dan kearifan lokal. Demonstrasi tetap diakui sebagai bagian penting dari partisipasi masyarakat, tetapi pelaksanaannya menuntut tanggung jawab sosial, penghormatan terhadap hak orang lain, dan pemuliaan terhadap martabat manusia. Tujuan pertama dan ketiga tercapai melalui kesepakatan peserta mengenai batas antara aspirasi yang sah dan tindakan destruktif, termasuk kesadaran akan kerugian nonmaterial dari kekerasan.

Terkait tujuan kedua, nilai *Sipakatau*, *Sipakalebbi*, dan *Sipakamase-mase* dinilai peserta relevan sebagai landasan etis bagi budaya demokrasi yang damai. *Sipakatau* menyediakan prinsip memanusiakan pihak lain, *Sipakalebbi* menyediakan prinsip penghormatan, sedangkan *Sipakamase-mase* menyediakan prinsip kasih sayang dan empati. Terkait tujuan keempat, tradisi *tudang sipulung* dinilai dapat direaktualisasikan menjadi forum dialog multipihak, dengan catatan bahwa penerapan nilai budaya tidak boleh berubah menjadi alat pemaksaan keseragaman. Ketercapaian keempat tujuan tersebut terbaca pada tingkat keluaran dan hasil jangka pendek; perubahan yang bertahan sesudah kegiatan masih perlu diukur pada forum lanjutan.

Empat langkah lanjutan disarankan berdasarkan pengalaman kegiatan ini. Pendidikan demokrasi berbasis budaya lokal perlu diperkuat pada tingkat sekolah dan perguruan tinggi. Forum dialog multipihak sebaiknya diselenggarakan secara terencana, bukan hanya ketika ketegangan sudah muncul, dengan dukungan kader fasilitator sebaya. Tokoh masyarakat dan tokoh adat dapat dilibatkan sebagai mediator sosial. Ketiga nilai tersebut, bersama *Sipakainge*, layak diintegrasikan ke dalam program pemberdayaan masyarakat yang dijalankan pemerintah daerah maupun organisasi kemasyarakatan.

Kegiatan ini memiliki keterbatasan yang perlu dinyatakan secara terbuka. Kegiatan tidak memasang pengukuran sebelum dan sesudah forum maupun penelusuran pascakegiatan, sehingga perubahan pemahaman dan sikap peserta tidak dapat dinyatakan secara kuantitatif dan daya tahannya belum diketahui. Capaian pada tingkat hasil bertumpu pada catatan fasilitator dan rumusan refleksi, yang menangkap pandangan yang muncul selama forum tetapi tidak menjamin bahwa pandangan itu diterapkan sesudahnya. Jumlah peserta inti yang terbatas juga membuat temuan tidak dapat digeneralisasi pada masyarakat Kota Makassar. Forum lanjutan perlu menerapkan instrumen evaluasi pada Tabel 4, memantau peserta secara berkala, dan secara khusus membahas prinsip *Sipakainge* agar dampak kegiatan dapat diukur dan diperdalam.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada SERUM Institute atas kerja sama dalam merancang dan menyelenggarakan forum, para narasumber lintas unsur, serta seluruh peserta kegiatan.

DAFTAR REFERENSI

Armin, R. A., Adliyah, N., & Putra, A. A. P. (2025). Sipakatau as a model for conflict resolution in village head elections in Luwu Regency, South Sulawesi. *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum*, *19*(2), 247–286.

https://doi.org/10.24239/blc.v19i2.4350

Arnstein, S. R. (1969). A ladder of citizen participation. *Journal of the American Institute of Planners*, *35*(4), 216–224. https://doi.org/10.1080/01944366908977225

Braun, V., & Clarke, V. (2021). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis? *Qualitative Research in Psychology*, *18*(3), 328–352. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Cornwall, A. (2008). Unpacking 'participation': Models, meanings and practices. *Community Development Journal*, *43*(3), 269–283. https://doi.org/10.1093/cdj/bsn010

Diab, A. L., Pabbajah, M., Widyanti, R. N., Muthalib, L. M., & Widyatmoko, W. F. (2022). Accommodation of local wisdom in conflict resolution of Indonesia's urban society. *Cogent Social Sciences*, *8*(1), 2153413. https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2153413

Fatir, M. D. (2025, August 31). BPBD Makassar: Korban jiwa insiden demonstrasi 4 orang. *ANTARA News Jawa Timur*. Retrieved from https://jatim.antaranews.com/berita/968537/bpbd-makassar-korban-jiwa-insiden-demonstrasi-4-orang

Feinberg, M., Willer, R., & Kovacheff, C. (2020). The activist's dilemma: Extreme protest actions reduce popular support for social movements. *Journal of Personality and Social Psychology*, *119*(5), 1086–1111. https://doi.org/10.1037/pspi0000230

Fishkin, J., Siu, A., Diamond, L., & Bradburn, N. (2021). Is deliberation an antidote to extreme partisan polarization? Reflections on "America in One Room". *American Political Science Review*, *115*(4), 1464–1481. https://doi.org/10.1017/S0003055421000642

Garing, J., Firdaus, W., Herianah, H., Ridwan, M., Erniati, E., Budiono, S., & Pariela, T. D. (2023). Identifying and resolving conflicts using local wisdom: A qualitative study. *Journal of Intercultural Communication*, *23*(4), 69–81. https://doi.org/10.36923/jicc.v23i3.156

Gernert, M., Schuber, A. A., & Schaller, A. (2023). Experiences in the application of logic models in the context of workplace health promotion: A focus group discussion. *Evaluation and Program Planning*, *100*, 102347. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102347

Habermas, J. (1996). *Between facts and norms: Contributions to a discourse theory of law and democracy* (W. Rehg, Trans.). Cambridge, MA: MIT Press.

Hamzah, H., Zubair, A., & Satriadi, S. (2023). The relevance of the Buginese local wisdom values to religious moderation. *Al-Qalam*, *29*(1), 185–197. https://doi.org/10.31969/alq.v29i1.1173

Kowalski, M. J. (2023). Measuring changes with traditional and retrospective pre-posttest self-report surveys for a brief intervention program. *Evaluation and Program Planning*, *99*, 102323. https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2023.102323

Ning, X., Liu, Y., Miao, J. L., & Li, W. L. (2024). Enhancing the potentials of the focus group discussion: Engaging frequently neglected but essential situational factors for analyzing data. *International Journal of Qualitative Methods*, *23*. https://doi.org/10.1177/16094069241306332

Nismara, C. A., Jana, D. F. A., Aini, S. N., & Puspitasari, S. (2025). Conflict resolution based on local wisdom in multicultural communities in Indonesia. *International Journal of Geography, Social, and Multicultural Education*, *3*(2), 27–36. https://doi.org/10.26740/ijgsme.v3n2.p27-36

Nuh, M. S. (2016). Tudang Sipulung: A conflict resolution wisdom of Bugis-Makassar community. *Hasanuddin Law Review*, *1*(2), 241–249. https://doi.org/10.20956/halrev.v1i2.308

Nur, R. J., Wildan, D., & Komariah, S. (2023). Kekuatan budaya lokal: Menjelajahi 3S (Sipakatau, Sipakalebbi, dan Sipakainge') sebagai simbol kearifan lokal. *MIMESIS*, *4*(2), 166–179. https://doi.org/10.12928/mms.v4i2.8105

Putnam, R. D. (1995). Bowling alone: America's declining social capital. *Journal of Democracy*, *6*(1), 65–78. https://doi.org/10.1353/jod.1995.0002

Rahmawati, R., & Eli, E. (2023). Pendidikan karakter berbasis nilai-nilai budaya Bugis "Sipakatau, Sipakalebi, Sipakainge" di komunitas peduli anak jalanan Makassar. *Jurnal Pendidikan Karakter*, *14*(2), 177–186. https://doi.org/10.21831/jpka.v14i2.63715

Riswandi, R. (2024). Sipakalebbi sebagai model komunikasi antarbudaya etnis Bugis dan etnis Konjo di Sulawesi Selatan, Indonesia. *Al-Adabiya: Jurnal Kebudayaan dan Keagamaan*, *19*(2), 175–196. https://doi.org/10.37680/adabiya.v19i2.5650

Salle, Zainuddin, & Wahida. (2026). Tudang Sipulung: A local wisdom-based land dispute resolution mechanism for sustainable development. *Indonesian Journal of Environmental Law and Sustainable Development*, *5*(1), 167–194. https://doi.org/10.15294/ijel.v5i1.29015

Shuman, E., Goldenberg, A., Saguy, T., Halperin, E., & van Zomeren, M. (2024). When are social protests effective? *Trends in Cognitive Sciences*, *28*(3), 252–263. https://doi.org/10.1016/j.tics.2023.10.003

Sukriono, D., Sudirman, S., Rapita, D. D., Al Atok, A. R., & Bramantya, A. (2025). Local wisdom as legal dispute settlement: How Indonesia's communities acknowledge alternative dispute resolution? *Legality: Jurnal Ilmiah Hukum*, *33*(1), 261–285. https://doi.org/10.22219/ljih.v33i1.39958

Wardyah, N. S. (2025, October 1). Makassar doakan korban tragedi 29 Agustus 2025. *ANTARA News Megapolitan*. Retrieved from https://megapolitan.antaranews.com/berita/445849/makassar-doakan-korban-tragedi-29-agustus-2025

Zubair, A., Hamzah, H., & Satriadi, S. (2022). Living religious moderation within the Sipakatau, Sipakainge', and Sipakalebbi cultures of the Bugis community. *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, *30*(2), 195–214. https://doi.org/10.21580/ws.30.2.13048